BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Program pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung, walaupun tidak dilakukan langsung oleh Dinas Sosial Kota Bandung tetapi menurut penyusun bukanlah suatu alasan, karena Dinas Sosial Kota Bandung memiliki tugas yang mereka emban untuk menyelesaiakan permasalahan sosial di Kota Bandung, para anak jalanan dapat dihentikan untuk mencari nafkah di jalanan yang bukanlah tempat yang seharusnya Sosiallisai kepada masyarakat, merupakan hal yang penting dan tidak dapat dikesampingkan, karena bagaimanapun masyarakat merupakan tempat berinteraksi langsung para anak jalanan.

Pengawasan, pendampingan sosial para anak jalanan yang merupakan faktor penting pada proses pemberdayaan, tidak dapat dikesampingkan dan sangat penting untuk dilakukan secara berkesinambungan, dengan kualitas pengawasan yang baik maka akan ada data atau gambaran mengenai bagaimana tingkat perkembangan anak jalanan di Kota Bandung, dengan nampaknya gambaran tersebut maka secara langsung dapat memberikan kemudahan bagi Dinas Sosial dalam menjalankan program pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai proses dalam penyelesaian masalah anak jalanan dan program pendampingan sosial sebagai program penting bagi orang tua maupun keluarga para anak jalanan.

Berdasarkan hasil Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan penyusunan laporan yang telah penyusun sampaikan pada bab-bab sebelumnya, mengenai Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dapat disimpulkan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator produktivitas kinerja aparatur Dinas Sosial Kota Bandung, dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Bandung, penyusun lihat belum maksimal, Dinas Sosial Kota Bandung sebagai pihak penyalur anak jalanan di Kota Bandung kepada Dinas Sosial

Provinsi Jawa Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Rumah Perlindungan Anak (RPA), belum mampu memberikan terobosan-terobosan dalam proses pemberdayaan anak jalanan kepada pihak-pihak tersebut, hingga menimbulkan kesan Dinas Sosial Kota Bandung hanya sebagai tempat pemberhentian sementara bagi para anak jalanan, hal tersebut terjadi dikarenakan masih kurangnya sumberdaya aparatur di Dinas Sosial Kota Bandung.

2. Berdasarkan indikator kualitas layanan, Dinas Sosial Kota Bandung, dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Bandung, penyusun lihat belum maksimal, dikarenakan Dinas Sosial Kota Bandung hingga saat ini belum memiliki tempat penampungan bagi para anak jalanan, ditambah dari tahun 2009 hingga saat ini data yang dimiliki Dinas Sosial Kota Bandung mengenai jumlah anak jalanan di Kota Bandung belum berubah, hal terebut memperlihatkan ketidakseriusan Dinas Sosial Kota Bandung, dalam beberapa tahun terakhir, dalam menanganai anak jalanan di Kota Bandung yang mengakibatkan banyaknya ketidakpuasan berbagai pihak, dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandung.
3. Berdasarkan indikator Responsivitas, Dinas Sosial Kota Bandung, dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Bandung, penyusun nilai kurang maksimal karena Dinas Sosial kota Bandung, masih lemah dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk mengenali anak jalanan diperlukan suatu pendekatan secara langsung, Dinas Sosial Kota Bandung sebenarnya telah membangun posko pemantau anak jalanan di Kota Bandung, namun hingga saat ini belum jelas mengenai kelanjutan dari setiap petugas posko tersebut, dan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Dinas Sosial Kota Bandung belum dapat melakukan program-program pendampingan sosial yang sejatinya perlu dilakukan secara beriringan dengan proses pemberdayaan anak jalanan.
4. Berdasarkan indikator Responsibilitas, Dinas Sosial Kota Bandung, penyusun lihat saat melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sudah

cukup baik, selalu ada kordinasi-kordinasi yang baik baik antara kepala dinas dengan para aparaturnya maupun antara para aparaturnya itu sendiri, begitu pula antara Dinas Sosial Kota Bandung dengan para penjangkau anak jalanan dan pelaku pemberdayaan seperti Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Provinsi Jawa Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun Rumah perlindungan Anak (RPA) dalam penitipan anak jalanan di Kota Bandung, telah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakannya.

5. Berdasarkan indikator Akuntabilitas, Dinas Sosial Kota Bandung, belum mampu merubah cara masyarakat untuk memberikan sedekah kepada anak jalanan tanpa merubah kebiasaan norma-norma yang telah tumbuh dan berkembang dimasyarakat yang telah tertanam sejak lama, dengan demikian Dinas Sosial Kota Bandung secara timbal balik, belum mamapu dalam kegiatannya sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

4.2 Saran

Penyelesaian anak jalanan lewat program pemberdayaan sejatinya bila dilakukan dengan proses yang baik dan tentunya dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, baik pada proses input maupun pada proses pemberdayaannya, tentu tidak akan menutup kemungkinan menjadi suatu jawaban dalam penyelesaian anak jalanan di Kota Bandung, untuk memperbaiki kinerja Dinas Sosial Kota Bandung, disini penyusun akan memaparkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Bandung harus memiliki infrastruktur sendiri dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung seperti, tempat penampungan anak jalanan, posko pengawasan yang dijalankan sebagaimana fungsinya dan kendaraan pemantau untuk memantau kegiatan para anak jalanan.

2. DInas Sosial Kota Bandung harus berperan aktif dalam program pemberdayaan anak jalanan di Kota Bandung yang dilakukan oleh beberapa instansi dan lembaga terkait seperti, Dinas Sosial Jawa Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat (SDM) dan Rumah Perlindungan Anak (RPA), yang telah menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bandung.
3. Dinas Sosial Kota Bandung mesti melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Praja (Satpol PP) mengenai, penertiban para anak jalanan, agar penertiban tersebut dilakukan dengan cara yang baik yang bertujuan agar tidak merusak hak-hak anak.
4. Dinas Sosial Kota Bandung harus melakukan pelatihan-pelatihan bagi para aparaturnya, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja para aparaturnya demi meningkatkan kualitas Dinas Sosial Kota Bandung itu sendiri, khususnya dalam program penanganan para anak jalanan di Kota Bandung.
5. Dinas Sosial Kota Bandung harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Bandung secara bertahap serta berkesinambungan, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Kota Bandung mengenai cara tepat dalam membantu para anak jalanan.
6. Dinas Sosial Kota Bandung baiknya memiliki data terbaru para anak jalanan di Kota Bandung, yang bertujuan untuk mengetahui grafik peningkatan anak jalanan di Kota Bandung, dengan adanya data maka akan mempermudah Dinas Sosial Kota Bandung dalam melakukn penanganan para anak jalanan.
7. Proses pendampingan sosial, yang merupakan proses bantuan dan pelatihan bagi para orang tua maupun keluarga para anak jalanan harus diadakan dan diselaraskan dengan program pemberdayaan kepada anak jalanan, agar para anak jalanan setelah proses pemberdayaan berakhir yang merupakan proses *input* dari pemberdayaan, kembali ke rumah dengan suasana yang baru.